"PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK"

Oleh :

Lidia Nurhayati Pasaribu
21110189

Diwabah Bimbingan Prof.Dr.Hj.Dwi Kartini.SE.,Spec.Lic

ABSTRACT

Problems in this study is the level of compliance in the city of Bandung in paying taxes is still low. Cause of low compliance among other taxpayers the most knowledge of the taxpayer is still low and the duration of the tax inspection conducted DJP.

Purpose of the study to determine the effect of the tax and the taxpayer knowledge of taxpayer compliance on 2 Tax Offices in Bandung and Cimahi. The method used in research is descriptive method verifikatif. The unit of analysis of this study is 2 Tax Offices in Bandung and Cimahi. The use of statistics used are validity and reliability, multiple linear regression analysis using SPSS 19.0 program assistance applications for Windows.

The results showed the knowledge of the taxpayer and tax examination simultaneously give effect to the taxpayer in compliance with the tax office on 2 Tax Offices in Bandung and Cimahi. Among the independent variables, tax audit give greater influence on taxpayer compliance than taxpayers knowledge in the 2 Tax Offices in Bandung and Cimahi .

Keywords: Taxpayer Knowledge, Tax Audit, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara,baik untuk pembiayaan pembangunan maupun pembiayaan anggran rutin. Oleh karena itu ,guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan ,baik subjek maupun objek pajak yang ada.(Timbul Hamonangan,2012:83)

Menurut Soemitro (Mardiasmo,2009:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum. Dari definisi tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena dirasa menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas meskipun secara teori nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya masyarakat yang membayar pajak pun akan menikmati pajak yang telah ia setorkan (Mardiasmo, 2009 : 1).

Mengingat sektor pajak memiliki posisi penting dan strategis bagi pendapatan negara,sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara sehingga Reformasi perpajakan yang dilakukan di Indonesia dimulai sejak

Tahun 1984, sistem pemungutan pajak berubah dari *official assesment system* menjadi *self assesment system* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:99).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self assesment system* adalah menghitung atau menilai sendiri,jadi wajib pajak sendirilah yang menhitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakanya.

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment* memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menunjang dari *Self Assessment* System tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling, e-SPT, e-NPWP, e-regristration, drop box dan e-banking*. Wajib Pajak potensial yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak aktual sesuai dengan kenyataannya masih banyak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha namun juga telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga ada yang tidak taat untuk membayar pajak. (Murti, Sondakh & Sabijono,2014).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia,baik bagi negara maju maupun berkembang.Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran,pengelakan,penyelundupan dan pelailain pajak. Yang pada akhirmya tindakan tersebut menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang(Siti Kurnia Rahayu,2010:140)

Menurut Timbul Hamonangan (2012:86) menyatakan bahwa masyarakat wajib pajak dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan kepatuhan. Pada tingkatan paling baik atau ideal di mana wajib pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakankewajiban perpajakanya dengan baik *(willing to do the right things),*Tingkat kepatuhan selanjutnya adalah masyarakat wajib pajak yang selalu mencoba coba untuk memanfaatkan peluang menghindar pajak walau tidak selalu berhasil *(try but do not always succed),* yang selanjutnya adalah Wajib pajak yang tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku *(dont want comply)*, Tingkat kepatuhan yang terakhir adalah sudah ada pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibanya *(have decided not to comply)*.

Chandra Budi selaku Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang dimuat pada harian PikiranRakyat.com pada tanggal 16 Juli 2013 mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Ditjen Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar,sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba, penyebab utama perilaku ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ini disebabkan masyarakat atau WP mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan.

Adjat Djatnika selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 yang dimuat pada harian pikiran rakyat.com com pada 15 Maret 2012 menuturkan Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung dalam melakukan pembayaran pajak baru hingga 2011 baru mencapai 42%, dari sekitar 385.000 wajib pajak di Kota Bandung, yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), angka tersebut tergolong rendah karena tidak sampai menembus setengah jumlah wajib pajak di Kota Bandung.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, kemungkinan disebabkan dua faktor. Pertama, sosialisasi yang minim sehingga wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan kedua, karena wajib pajaknya yang enggan membayar pajak karena alasan-alasan tertentu. Dia juga berharap, wajib pajak tidak mengerdilkan kewajiban melakukan pembayaran pajak dengan alasan setoran pajak

yang tidak masuk ke kas daerah,lebih lanjut, Adjat mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu untuk mendongkrak tingkat kepatuhan membayar pajak. (Adjat Djatnika ,2012)

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara,pelayanan pada wajib pajak,penegakan hukum perpajakan,pemeriksaan pajak,dan tarif pajak. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakanya. (Siti Kurnia Rahayu,2010)

Menurut Hatipah Haroen Al Rasjid selaku Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan & Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar yang dimuat pada berita harian pikiranrakyat.com pada tanggal 18 Desember 2013 menyatakan bahwa Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, ada 22 juta wajib pajak terdaftar tapi itu pun belum seluruhnya membayar pajak sesuai ketentuan dan dari 22 juta itu juga apa sudah membayar pajak sesuai ketentuan atau tidak. Itu juga karena pengetahuan masyarakat tentang pajak masih kurang,oleh karena itu, Hatipah mengatakan masyarakat perlu diberikan pemahaman pajak supaya kesadaran dapat terbangun. Upaya ini tidak dipungkiri memerlukan upaya panjang dan tantangan terutama terkait image negatif dengan orang-orang pajak yang saat ini melekat di masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. (Siti Kurnia Rahayu:2010).

M Taufik Umar dalam pusatperpajakan.blogspot.com pada Januari 2010 menyatakan bahwa pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang–wenang dalam melaksanakan pemeriksaan. Wajib Pajak banyak mengeluhkan ketidakadilan, karena sebagian Wajib Pajak merasa lebih sering diperiksa dibandingkan Wajib Pajak lainnya. Wajib Pajak juga mengeluhkan prosedur pemeriksaan yang berbelit-belit dan hanya mencari-cari kesalahan, seakan-akan tidak diberi kepercayaan.

Untuk mengawali pemeriksaan adalah SPT atau laporan wajib pajak atas pajak terutang. Pemeriksaan pajak tersebut akan diperoleh tingkat kebenaran dari SPT beserta lampirannya seperti laporan keuangan dan lampiran-lampiran. Hasil pemeriksaan akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Siti Kurnia Rahayu:2010)

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah. Ditjen Pajak mencatat, Wajib Pajak Orang Pribadi, baru sekitar 25 juta saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, Ditjen Pajak mencatat baru sekitar 520 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba.

2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih minim. Hal ini karena pengetahuan mengenai pajak yang diperoleh masyarakat belum optimal
3. Pemeriksaan seringkali menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak yang diperiksa. Wajib Pajak sering merasa pemeriksa terlalu sewenang–wenang dalam melaksanakan pemeriksaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran terutama masalah mengenai pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Bandung dan Cimahi. .

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pemerikssan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan wajib pajak dan Pemerikssan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.

KERANGKA PENELITIAN

Keterkaitan antara Pengetahuan Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) menyatakan bawah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

> “Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya . Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pengetahuan yang dimiliki wajib pajak baik itu pengetahuan mengenai perubahan peraturan”.

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

> “Rasa nasionalisme tinggi,kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan, dan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik secara administrasi maupun pidana fiskal,maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Keterkaitan antara Pemeriksaan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut John Hutagaol (2007 : 63) Menyatakan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut :

> “Tujuan Pemeriksaan Pajak (*tax audit)* adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lainnya,dalam kerangka *self assesment* pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement)* yang dilakukan oleh pemeritah”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) Menyatakan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut :

> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak".

METODE PENELITIAN

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2013:3) menyatakan bahwa :

> "Metode penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman,jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun/memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian,artinya harus dipecaya kebenarannya".

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif, yaitu suatu metode yang berusaha memberikan gambaran deskripsi mengenai data atau kejadian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada situasi yang diselidiki peneliti. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2011:147) adalah sebagai berikut :

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi"

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Mashuri (2008) dalam Umi Narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain ;"dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

DESAIN PENELITIAN

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	Metode yang digunakan	Unit Analis	Time Horizon
T-1	*Descriptive*	*Descriptive Survey*	WP	*Cross Sectional*
T-2	*Descriptive*	*Descriptive Survey*	WP	*Cross Sectional*
T-3	*Descriptive analysis& verificatief*	*Explanatory Survey*	WP	*Cross Sectional*

OPERASIONALISASI VARIABEL

Table 3.2
Operasional variable

Variabel /Konsep Variabe	Indikator	Skala
Pengetahuan Wajib Pajak Menurut Siti Resmi (2009:11) Menyatakan bahwa Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT".	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010;173) pengetahuan wajib pajak dapat diukur dari : "1. Pemahaman Prosedur/cara pengisian SPT 2. Pemahaman batas waktu pelaporan SPT 3. Pemahaman sanksi perpajakan dan administrasi"	Ordinal
Pemeriksaan Pajak Menurut Mardiasmo (2009:50) Menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan ,mengolah data dan atau keterangan lainya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan"	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:292) pemeriksaan pajak diukur dari : "1. Persiapan Pemeriksaan 2. Pelaksanaan Pemeriksaan 3. Pelaporan Hasil pemeriksaan"	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) Menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".	Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak formal menurut John Hutagaol (2007:3) adalah: "1. Ketepatan waktu menyetor pajak terutang. 2. Ketepatan waktu pelaporan SPT."	Ordinal

SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

SUMBER DATA

Jenis Data Yang Digunakan Peneliti Mengenai "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" adalah data Primer .

Data Primer Menurut Burhan Bungin (2013:128) menyatakan bahwa :
"Data Primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan".

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data Primer yaitu melalui cara menyebar kuisioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini wajib pajak di 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung dan Cimahi **.**

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto(2006:130) Populasi adalah :

> " Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitianya merupakan penelitian populasi".

Populasi yang digunakan adalah Petugas fungsional pemeriksa pajak yang ada di 2 KPP wilayah kota Bandung dan Cimahi.

Sampel

Menurut Juliansyah Noor (2011: 255) sampel adalah sebagai berikut:

> "Sampel adalah bagian populasi yang diteliti ".

Sedangkan menurut Burhan Bungin (2013:104) menyatakan bahwa :

"Sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada dalam populasi".

Untuk menentukan sampel yang akan diteliti terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Untuk teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan judul yang diteliti adalah *nonprobability sampling*.

Menurut Sugiyono (2008:66) pengertian *nonprobability sampling* adalah:

"*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel."

Jenis *nonprobability sampling* yang dipilih oleh penulis adalah *sampling jenuh* . sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi reative kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil, istilah lain sampling jenuh adalah sensus, dimana seua anggota populasi dijadikan sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah 35 pegawai fungsional pemeriksa pajak di 2 KPP wilayah Bandung dan Cimahi .

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara penelitian lapangan (*Field Research).*

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan
   Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek pajak penelitiannya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengambil data secara langsung.
   a. Observasi Dengan cara melakukan pengamatan ke 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung dan Cimahi.
   b. Dokumentasi Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung dan Cimahi.
2. Penelitian Kepustakaan
   Yaitu Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.
3. Kuisioner
   Yitu merupakan daftar yang diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kuisioner ini dibagikan kepada pegawai fungsional pemeriksa pajak di di 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung dan Cimahi.
4. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai fungsional pemeriksa pajak di di 2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung dan Cimahi.

Untuk setiap pilihan jawabn diberi skor ,maka responden harus menggambarkan ,mendukung pernyataan (positif) atau tidak mendukung pernyataan (negatif) . Skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skor Pernyataaan Positif

No	Keterangan	Skor
5	Sangat Setuju	5<
4	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
2	Tidak Setuju	2
1	Sangat Tidak Setuju	1

HASIL PENELITIAN

1. Tanggapan Responden Menegenai Pengetahuan Wajib Pajak
   Melalui jumlah skor tanggapan dari 8 pernyataan yang diajukan mengenai Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) termasuk dalam kategori “Baik” sebesar 76,5% .
2. Tanggapan Responden Menegenai Pemeriksaan Pajak
   Melalui jumlah skor tanggapan dari 10 pernyataan yang diajukan mengenai Variabel Pemeriksaan Pajak (X_2), maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Pemeriksaan Pajak (X_2) termasuk dalam kategori “Baik” sebesar 75.08%.

3. Tanggapan Responden Menegenai Kepatuhan Wajib Pajak
   Melalui jumlah skor tanggapan dari 5 pernyataan yang diajukan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y), maka dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) termasuk dalam kategori “Baik” sebesar 76,22%.

ANALISIS VERIFIKATIF

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov smirnov*. Berikut disajikan hasil output program *SPSS 19.0* uji normalitas data dengan menggunakan ujinormal *p-plot*.

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.86113083
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.077
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		.619
Asymp. Sig. (2-tailed)		.838

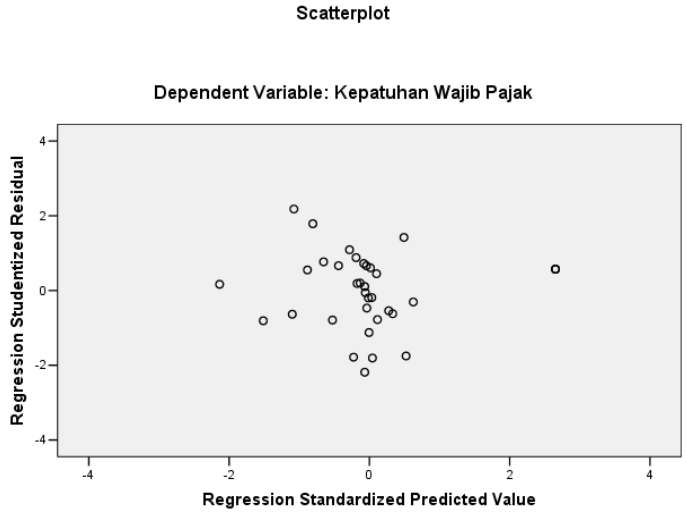
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari perhitungan diperoleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,838. Dikarenakan kedua nilai tersebut lebih besar daripada alpha (Asymp.Sig. > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual tersebut berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastistias

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki varians yang sama (homo). Pengujian heterokedastisitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Scatter Plot*. Berikut disajikan hasil uji heteroskedastisitas metode uji *Scatter plot* dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS:



Gambar 4.1 Hasil Uji *Heteroskedastisitas*

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan dan tidak membentuk sebuah pola serta sebarannya berada diatas dan dibawah titik nol. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortagonal. Variabel ortagonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/*tolerance*) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai *cut-off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, 2001: 57).

Dengan menggunakan program *SPSS 19.0 for Windows*, didapat *output* nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas sebagai berikut.

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Wajib Pajak	.592	1.689
	Pemeriksaan Pajak	.592	1.689

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil diatas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas jauh di bawah 10, yakni X_1 = 1,689 dan X_2 = 1,689. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X_1 = Pengetahuan Wajib Pajak
X_2 = Pemeriksaan Pajak
b_0 = Bilangan konstanta
b_1, b_2 = Koefisien regresi

Dengan menggunakan program *SPSS 19.0 for Window*s, diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.401	1.424		.984	.332
	Pengetahuan Wajib Pajak	.225	.087	.336	2.588	.014
	Pemeriksaan Pajak	.274	.063	.569	4.379	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari *output* di atas diketahui nilai kontstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$Y = 1{,}401 + 0{,}225\ X_1 + 0{,}274\ X_2$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

$b_0 = 1{,}401$ artinya jika variabel X_1 dan X_2 bernilai nol (0), maka variabel Y akan bernilai 1,401 satuan.

$b_1 = 0{,}225$ artinya jika Pengetahuan Wajib Pajak (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,225 satuan.

$b_2 = 0{,}274$ artinya jika Pemeriksaan Pajak (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,274 satuan.

Analisis Koefisien Determinasi

Setelah diketahui nilai R sebesar 0,825, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825[a]	.681	.661	1.91841

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

KD = R^2 X 100%
= $(0{,}825)^2$ X 100%
= 68,1%

Dengan demikian, maka diperoleh nilai KD sebesar 68,1% yang menunjukkan arti bahwa Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 68,1% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang diabaikan penulis.

Koefisien Beta x Zero-order:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Correlations		
		B	Std. Error	Beta	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	1.401	1.424				
	Pengetahuan Wajib Pajak	.225	.087	.336	.699	.416	.259
	Pemeriksaan Pajak	.274	.063	.569	.783	.612	.438

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Variabel X_1 = 0,336 x 0,699 = 0,2350 = 23,50%
2. Variabel X_2 = 0,569 x 0,783 = 0,4455 = 44,55%

Dari hasil uji individu diatas diketahui bahwa variabel X_1 (Pengetahuan Wajib Pajak) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) memiliki pengaruh positif sebesar 0,2350 atau 23,50% dan X_2 (Pemeriksaan Pajak) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) memiliki pengaruh positif sebesar 0,4455 atau 44,55%.

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

H_0 : Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H_1 : Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%

Dengan menggunakan program *SPSS 19.00 for windows*, diperoleh *output* sebagai berikut:

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	250.878	2	125.439	34.084	.000[a]
	Residual	117.769	32	3.680		
	Total	368.647	34			

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *output* di atas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 34,084 dengan *p-value* (sig) 0,000. Dengan α=0,05 serta derajat kebebasan v_1 = 32 (n- (k+1)) dan v_2 = 2, maka di dapat F_{tabel} 3,295. Dikarenakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (34,084 > 3,295) maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Dengan menggunakan program *SPSS 19.00 for windows*, diperoleh *output* sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.401	1.424		.984	.332
	Pengetahuan Wajib Pajak	.225	.087	.336	2.588	.014
	Pemeriksaan Pajak	.274	.063	.569	4.379	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- Pengujian hipotesis variabel X_1 (Pengetahuan Wajib Pajak)

  H_0 : Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

  H_1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

  Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 32 (n - (k+1)) didapat nilai t_{tabel} 2,037

  Dari *output SPSS* diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk X_1 sebesar 5,210 dan t_{tabel} 2,037. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pengujian hipotesis variabel X_2 (Pemeriksaan Pajak)

  H_0 : Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

  H_1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

  Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan kebebasan (v) = 32 (n - (k+1)) didapat nilai t_{tabel} 2,037

  Dari *output SPSS* diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk X_2 sebesar 4,379 dan t_{tabel} 2,037. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di 2 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung dan Cimahi , maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Melalui hasil pengujian parsial terbukti bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif. Artinya pengetahuan Wajib Pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada 2 Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung dan Cimahi.
2. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Artinya Pemeriksaan Pajak yang sesuai dengan prosedur Peraturan Perpajakan yang berlaku akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada 2 KPP di wilayah Bandung dan Cimahi.
3. Secara bersama-sama variabel Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak (simultan) memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada 2 KPP di wilayah Bandung dan Cimahi. Diantara variabel independen, Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada 2 KPP di wilayah Bandung dan Cimahi pngetahuan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pengetahuwan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega sebagai berikut :

1. Pengetahuan Wajib Pajak pada 2 KPP di wilayah Bandung dan Cimahi secara umum berada dalam kategori baik tetapi sebaiknya meningkatkan pemberian arahan dan sosialiasi mengenai ketentuan sesuai perundangundangan perpajakan kepada wajib pajak.
2. Pemeriksaan Pajak 2 KPP di wilayah Bandung dan Cimahi a secara umum berada dalam kategori baik agar mendekati ideal petugas pajak harus lebih meningkatkan kinerja mengenai pelaksanaan pemeriksaan serta pelaporan pemeriksaan

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, P.J.A. 2000. Pajak dan Pembangunan. UI Press. Jakarta

Burhan Bungin.2013.Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi.Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri

Ely suhayati dan Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar.2011.Metodologi Penelitian.Jakarta:PT Bumi Aksara

Husein Umar.2005.Metode penelitian untuk skripsi dan Thesis.Jakarta:Rajagrafindo Perkasa

John Hutagaol.2007.Perpajakan:Isu-isu Kontemporer.Yogyakarta:Graha Ilmu

Jonathan Sarwono.2006.Metlit Kuantitatif & Kualitatif.Yogyakarta: Graha Ilmu

Juliansyah Noor.2011.Metodologi Penelitian : Skripsi,Thesis,Disertasi dan Karya Ilmiah.Jakarta: Kencana Prenado Media Group

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo.2011.Perpajakan edisi revisi 2011.Yogyakarta: C.V Andi Offset

Safri Nurmantu.2005.Pengantar Perpajakan.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia

Siti Resmi. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta

Siti Resmi. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Statistik untuk Penelitian. Bandung*: CV.Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Statistik untuk Penelitian Edisi* 16. Bandung: CV.Alfabeta

Sugiyono. 2012. Metode *Penelitian Kombinasi (Mixed Method*). Bandung: CV.Alfabeta

Timbul Hamonangan S.2012.Dimensi ekonomi Perpajakan dalam pembangunan ekonomi.Bogor : Penerbit Raih Asa Sukses

Umi Narimawati. (2008). *Teknik-teknik Analisis Multivariat untuk Riset* Ekonomi. Yogykarta: Graha Ilmu

Zainal Mustafa.2009.Mengutai variabel hingga instrumentasi.Yogyakarta:Graha ilmu

Zulgenif.2013.Metode Penelitian Sosial dan Bisnis.Yogyakarta:Graha Ilmu